

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara kepulauan, dianugerahi dengan berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah dan keragaman budaya etnik yang khas. Kekayaan ini menjadi fondasi kuat untuk mendukung pengembangan sektor nasional yang strategis, yaitu pariwisata. Pariwisata memiliki peran kunci dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi negara (Karman dkk, 2022). Pentingnya pariwisata dalam konteks nasional sangat besar. Pariwisata memberikan kontribusi dalam bentuk pendapatan kepada daerah atau pemerintah setempat yang menjadi tuan rumah objek wisata. Pariwisata melibatkan beragam jenis potensi, termasuk wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Ini mencerminkan keragaman potensi pariwisata yang ada di setiap daerah, yang dapat diidentifikasi, dikembangkan, dan dikelola guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan hiburan dan rekreasi (Kurniawan dkk, 2015).

Pariwisata adalah suatu sektor yang melibatkan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang dikelola oleh masyarakat, pengusaha, serta pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 10/2009. Dalam pengelolaan objek wisata, diperlukan perencanaan yang cermat yang mempertimbangkan berbagai aspek yang saling berhubungan, guna mencegah terjadinya kesalahan yang mungkin merugikan objek wisata tersebut. Proses perencanaan ini dimulai dengan mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah, yang meliputi aspek-aspek seperti warisan budaya, perkembangan ekonomi, hingga faktor politik (Apriliani dan Sudirga, 2022). Mengingat besarnya potensi sektor pariwisata di Indonesia, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memahami dan mengelola aspek-aspek tersebut agar sektor pariwisata di suatu daerah dapat berkembang dengan optimal, dan potensi wisata yang ada dapat dimanfaatkan secara efisien (Sihite dan Nugroho, 2018).

Pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai daerah, terutama jika potensi yang ada dapat dioptimalkan sepenuhnya. Selain itu, masyarakat juga

memiliki peran krusial dalam pengelolaan objek wisata, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif dalam sektor ekonomi, pelestarian budaya, dan pengembangan pendidikan di wilayah tersebut. Situasi serupa dapat diamati di Kabupaten Rembang, di mana terdapat objek wisata budaya dan wisata alam yang aktif dikelola baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat setempat. Pada Tabel I.1 menunjukkan jumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Rembang berdasarkan kecamatan.

Tabel I.1 Jumlah Wisata Kabupaten Rembang Perkecamatan

Kecamatan	Jumlah Objek
Kecamatan Rembang	9
Kecamatan Lasem	11
Kecamatan Sedan	4
Kecamatan Bulu	3
Kecamatan Kalori	2
Kecamatan Kragan	2
Kecamatan Sulang	2
Kecamatan Sluke	1
Kecamatan Sale	1
Kecamatan Sarang	1
Kecamatan Pancur	1
Kecamatan Gunen	1
Kecamatan Pamotan	1
Total	39

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, 2023)

Kabupaten Rembang terletak di wilayah pesisir Pantai Utara Jawa, persis di perbatasan antara provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Wilayah utara Kabupaten Rembang memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata. Kepesisiran ini memegang peran dalam meningkatkan fungsi ekonomi wilayah tersebut dengan munculnya apa yang disebut sebagai efek pemeran ganda atau *multiplayer effect*. Efek ini mencakup perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi utama di lokasi tersebut, dan juga melibatkan kegiatan yang berdampak tidak langsung dari sektor ekonomi sebelumnya (Indrayati dan Setyaningsih, 2017). Dengan dasar tersebut, perlu diperhatikan bahwa ekonomi di daerah pesisir tidak hanya terbatas pada kegiatan ekonomi dasar seperti

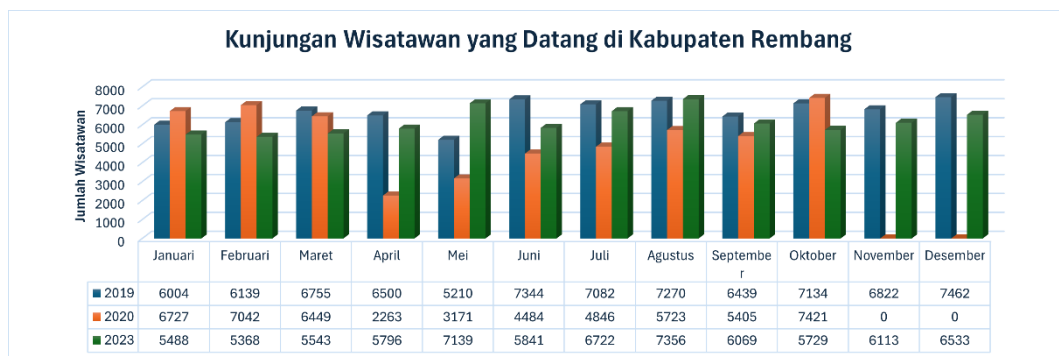
penangkapan ikan, tetapi juga memiliki potensi untuk diversifikasi melalui sektor pariwisata.

Pada Tabel I.2 menunjukkan jumlah wisatawan yang datang berkunjung di Kabupaten Rembang yang terdiri dari wisatawan domestik dan wisatawan asing pada setiap bulannya pada tahun 2019, 2020, dan 2023.

Tabel I.2 Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Rembang

Bulan	Wisatawan yang Datang (Jiwa)					
	Wisatawan Domestik			Wisatawan Asing		
	2019	2020	2023	2019	2020	2023
Januari	5999	6695	5480	5	32	8
Februari	6125	7015	5259	14	27	9
Maret	6740	6433	5543	15	16	0
April	6472	2263	5787	28	0	9
Mei	5190	3171	7122	20	0	17
Juni	7317	4484	5841	27	0	0
Juli	7061	4846	6713	21	0	9
Agustus	7232	5723	7356	38	0	0
September	6382	5405	6064	57	0	5
Oktober	7111	7421	5729	23	0	0
November	6785	0	6113	37	-	0
Desember	7434	0	6533	28	-	0
Tahun	79848	53456	73540	313	75	57

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, 2023)



Gambar I.1 Jumlah Wisatawan yang Berkunjung di Kabupaten Rembang

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, 2023)

Gambar I.1 mengilustrasikan penurunan dalam jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Rembang pada tahun 2023, yang korelatif dengan dampak pandemi

COVID-19. Pandemi ini, sebagai krisis global, telah memberikan efek merugikan pada berbagai sektor, termasuk pariwisata, dengan Kabupaten Rembang, sebagai bagian dari sektor pariwisata nasional, juga mengalami penurunan dramatis dalam jumlah kunjungan wisatawan akibat pandemi yang berlanjut (Kemenlu, 2022). Selain dampak yang diinduksi oleh pandemi, perlu dicatat bahwa penurunan ini juga dapat sebagian disebabkan oleh aspek lain, seperti terlambatnya pengembangan sektor pariwisata di wilayah ini dan kurangnya perawatan serta pemeliharaan fasilitas pariwisata yang telah ada selama beberapa tahun sebelum munculnya pandemi COVID-19 (Kemenlu, 2022).

Membangkitkan kembali industri pariwisata pasca-COVID-19 memerlukan pendekatan pembuatan kebijakan berbasis minat yang memprioritaskan kelangsungan operasional melalui pemeliharaan fasilitas yang tepat dan retensi staf (He dkk., 2021). Pelajaran dari pengalaman mahasiswa Erasmus sebagai pengunjung budaya menekankan pentingnya manajemen destinasi dalam merencanakan dan mengembangkan infrastruktur serta layanan pariwisata yang disesuaikan dengan kebutuhan pengunjung tertentu (Marin-Pantelescu dkk., 2022). Studi pengembangan pariwisata pedesaan, seperti di Kabupaten Kutai Kartanegara, mengungkapkan potensi dan status pariwisata di daerah pedesaan, menunjukkan peluang untuk pertumbuhan dan peningkatan (Dwiatmojo dkk., 2022). Renationalisasi maskapai penerbangan dan perusahaan pariwisata pasca-pandemi mencerminkan perubahan dalam struktur dan operasi industri, berdampak pada berbagai pemangku kepentingan (Σιγάλα, 2020).

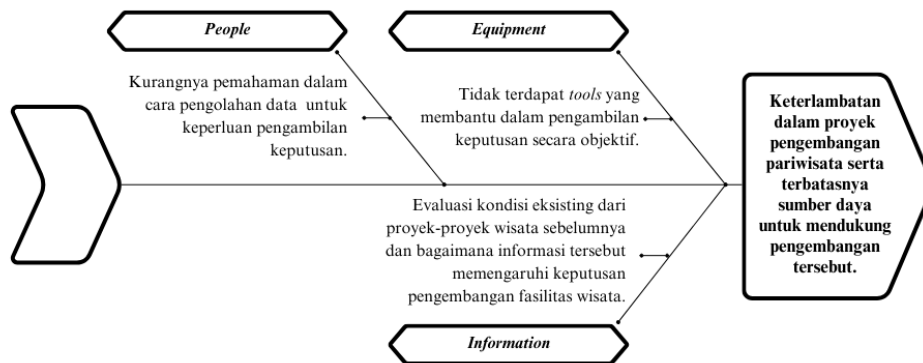
Tabel I. 3 Jumlah masyarakat bekerja dan Pengangguran di Kabupaten Rembang (persen)

Tahun	Angkatan Kerja	
	Bekerja	Pengangguran
2020	314.797	15.986
2021	348.727	13.293
2022	375.614	6.723
2023	370.269	9.896

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, 2023)

Tabel I.3 memperlihatkan data jumlah masyarakat yang bekerja dan tingkat pengangguran di Kabupaten Rembang. Terlihat adanya penurunan angka

pengangguran di Kabupaten Rembang, namun pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Peningkatan jumlah wisatawan di sektor pariwisata Kabupaten Rembang diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan. Kombinasi dari berbagai faktor ini menjadi penyebab utama penurunan tajam jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Rembang (Indrayati dan Setyaningsih, 2017).



Gambar I.2 *FishBone Diagram* Pengembangan Fasilitas Wisata Kabupaten Rembang

Gambar I.2 menggambarkan *FishBone Diagram* yang menguraikan masalah-masalah yang berkaitan dengan keterlambatan dalam proyek pengembangan pariwisata serta terbatasnya sumber daya untuk mendukung pengembangan tersebut harus terdapat prioritas dalam pengembangan fasilitas wisata di Kabupaten Rembang. Analisis masalah ini mencakup sejumlah permasalahan sentral yang menjadi fokus dalam pengembangan sektor pariwisata di wilayah tersebut.

Pertama, kurangnya pemahaman dalam cara pengolahan data untuk keperluan pengambilan keputusan. Pemahaman tentang pemrosesan data dalam pengambilan keputusan pengembangan fasilitas pariwisata sangat penting untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam pengembangan dan pemasaran objek wisata (Mehdil dkk., 2023). Selain itu, kendala kedua adalah ketersediaan alat untuk mendukung pengambilan keputusan objektif terkait pengembangan fasilitas pariwisata sangat penting (Mehdil dkk., 2022). Kendala ketiga juga penting untuk menilai status saat ini dari proyek pariwisata sebelumnya dan memahami bagaimana data ini mempengaruhi keputusan tentang pengembangan fasilitas pariwisata untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang efektif (Fada, 2023).

Keputusan mengenai pengembangan fasilitas wisata diambil berdasarkan data pendapatan tahunan dari sektor pariwisata, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ninik Sukmasari, S.E., M.M., Koordinator Pemberdayaan dan Pembinaan Pariwisata DISBUDPAR Kabupaten Rembang. Daerah wisata dengan pendapatan tertinggi akan menjadi prioritas untuk pengembangan fasilitas dan pendanaan. Namun, keputusan ini dapat menyebabkan ketidakmerataan dalam pengembangan fasilitas karena keterbatasan dana yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan prioritas yang tepat untuk memastikan pengembangan yang merata.

Perancangan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dalam sektor pariwisata di Kabupaten Rembang merupakan inisiatif penting untuk menentukan prioritas pengembangan fasilitas pariwisata dan mengatasi kendala yang ada. SPK ini dirancang dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk regulasi yang berlaku (Baggio dan Caporarello, 2005). Tujuan khusus dari penelitian ini meliputi pengembangan SPK untuk menentukan prioritas pengembangan fasilitas, implementasi SPK, dan penyusunan rekomendasi berbasis data kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan di sektor pariwisata.

SPK, sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, telah terbukti efektif dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata. SPK memberikan solusi komprehensif dalam menghadapi tantangan yang kompleks dalam pengembangan pariwisata (Chen, 2004). SPK membantu pemangku kepentingan untuk menganalisis data dan informasi yang relevan, yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif.

SPK dalam pariwisata tidak hanya fokus pada aspek-aspek teknis pengelolaan wisata, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan (Baggio dan Caporarello, 2005). Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Penerapan SPK dalam sektor pariwisata, terutama dalam konteks pengembangan fasilitas, membantu dalam mengevaluasi berbagai opsi dan skenario. Hal ini memungkinkan para pengambil keputusan untuk memprioritaskan proyek dan kegiatan yang paling

sesuai dengan tujuan strategis pariwisata daerah, sekaligus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang tersedia (Baggio dan Caporarello, 2005).

SPK juga berperan penting dalam mengidentifikasi kebutuhan pasar dan preferensi wisatawan (Bousset dkk., 2007). Melalui analisis data yang cermat, SPK dapat mengungkap tren dan pola dalam permintaan pariwisata, memungkinkan pengembangan fasilitas yang lebih sejalan dengan kebutuhan dan keinginan wisatawan.

Secara keseluruhan, pengembangan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dalam sektor pariwisata di Kabupaten Rembang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan yang sesuai. Ini tidak hanya dalam hal meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan, tetapi juga dalam mendukung pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang, dengan memberikan alat dan metode yang efektif untuk menangani tantangan kompleks dalam sektor ini.

I.2 Perumusan Masalah

Dalam konteks pengembangan fasilitas wisata di Kabupaten Rembang, dengan industri pariwisata sebagai salah satu sektor utama dalam perekonomian daerah tersebut, timbul sejumlah tantangan yang terkait dengan perluasan infrastruktur pariwisata dan peningkatan fasilitas wisata. Oleh karena itu, perumusan masalah dalam kerangka tugas akhir ini adalah bagaimana rancangan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang mampu secara efektif memprioritaskan pengembangan fasilitas wisata sesuai dengan regulasi diutamakan guna meningkatkan potensi pariwisata Kabupaten Rembang?

I.3 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan utama tugas akhir ini adalah merancang dan mengembangkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang memiliki peran dalam menentukan prioritas pengembangan fasilitas wisata, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk regulasi yang berlaku dan ketersediaan dana. Tujuan spesifik yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan SPK yang mampu memfasilitasi penentuan prioritas pengembangan fasilitas wisata dengan memanfaatkan data terbaru yang mengikat industri pariwisata.
2. Memberikan rekomendasi yang akurat dan berbasis data kepada para pemangku kepentingan terkait dalam pemilihan proyek pengembangan fasilitas wisata yang harus diprioritaskan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan di sektor pariwisata yang memiliki dampak besar terhadap pengembangan wilayah.

I.4 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini akan memiliki dampak bagi berbagai pemangku kepentingan, sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Peneliti: Bagi peneliti, penyelesaian tugas akhir ini akan memberikan kontribusi berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini akan memperkaya wawasan peneliti dalam merancang solusi yang tepat terkait pengembangan fasilitas wisata, serta meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip Sistem Pendukung Keputusan.
2. Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Rembang: Implementasi Sistem Pendukung Keputusan ini akan menjadi alat yang berharga bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi dan mengambil keputusan yang lebih terstruktur dalam pengembangan fasilitas wisata. Dengan demikian, manfaatnya mencakup peningkatan efisiensi dalam alokasi sumber daya dan dukungan dalam menjalankan visi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.
3. Manfaat bagi Masyarakat: Masyarakat setempat akan merasakan dampak positif dengan terciptanya lebih banyak lapangan kerja dan peningkatan pendapatan melalui perkembangan pariwisata. Selain itu, pengembangan fasilitas wisata yang berkelanjutan dapat berkontribusi pada pemeliharaan dan promosi budaya lokal.

I.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab pertama ini akan mengawali penulisan dengan mendalam memaparkan latar belakang yang melandasi signifikansi topik penelitian, yaitu pengembangan fasilitas wisata di Kabupaten Rembang. Latar belakang ini akan membantu dalam mempertegas urgensi dan relevansi topik penelitian, terutama dalam kerangka pengembangan sektor pariwisata. Selanjutnya, dalam bab ini akan diuraikan secara tegas masalah penelitian yang menjadi fokus utama, dengan penekanan khusus pada aspek-aspek permasalahan yang memengaruhi pengambilan keputusan terkait pengembangan fasilitas wisata. Selain itu, bab ini juga akan menguraikan tujuan penelitian yang terdiri dari pengembangan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dan manfaat yang diharapkan dihasilkan dari penelitian ini.

Bab II Landasan Teori

Bab kedua ini akan mendalam mengeksplorasi literatur yang komprehensif terkait dengan pengembangan fasilitas wisata, regulasi yang berlaku dalam industri pariwisata, serta konsep dan model Sistem Pendukung Keputusan. Melalui tinjauan ini, pembaca akan diberikan pemahaman mendalam tentang kerumitan masalah yang terkait dengan pengembangan fasilitas wisata di Kabupaten Rembang, termasuk berbagai regulasi yang memengaruhi pengambilan keputusan dalam sektor ini. Struktur kerangka kerja yang akan digunakan dalam penelitian juga akan dijelaskan dengan detail, memberikan dasar yang kuat bagi kerangka konseptual tugas akhir ini.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ketiga ini akan menguraikan secara cermat metodologi penelitian yang akan diterapkan dalam menjawab permasalahan terkait pengembangan fasilitas wisata. Bab ini akan mencakup pendekatan penelitian yang akan digunakan, teknik pengumpulan dan analisis data yang akan diadopsi, serta langkah-langkah strategis yang akan dirancang untuk pengembangan Sistem Pendukung Keputusan (SPK). Pembaca akan diberikan wawasan yang mendalam tentang pendekatan yang digunakan dalam penelitian, yang akan memperkuat dasar teoretis tugas akhir.

Bab IV Perancangan Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

Bab keempat ini akan memberikan gambaran terinci mengenai perancangan sistem pendukung keputusan (SPK), meliputi pemodelan, fungsi inti, dan algoritma yang akan diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan terkait prioritas pengembangan fasilitas wisata. Pembaca akan mendapatkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana SPK akan diaplikasikan dalam konteks pengembangan fasilitas wisata di Kabupaten Rembang, termasuk proses perancangan model proses dan deskripsi lengkap mengenai fungsi utama SPK. Algoritma yang akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan juga akan dijelaskan secara rinci, sehingga pembaca dapat memahami mekanisme inti yang melandasi penggunaan SPK.

Bab V Analisis Hasil dan Evaluasi

Bab kelima ini akan berfokus pada penguraian hasil yang diperoleh dari pengujian dan evaluasi sistem pendukung keputusan (SPK) yang telah diaplikasikan dalam lingkungan pengembangan fasilitas wisata. Hasil pengujian akan dianalisis secara cermat untuk memahami dampak efisiensi dalam pengambilan keputusan, terutama terkait dengan pengurangan biaya operasional dan ketaatan terhadap regulasi lingkungan. Analisis hasil ini akan memberikan dasar yang kuat untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas SPK.

Bab VI Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab terakhir ini akan merangkum kesimpulan yang kuat berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan ini juga akan diikuti oleh sejumlah rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan fasilitas wisata di Kabupaten Rembang. Bab ini akan menjadi penutup yang kokoh yang menegaskan kontribusi tugas akhir ini terhadap pemahaman dan praktik dalam pengembangan fasilitas wisata yang berkelanjutan di Kabupaten Rembang.